

PERANAN PRAJURIT PEREMPUAN (KORPS PRAJURIT ESTRI) TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN MILITER DI YOGYAKARTA 1750-1810

Yuliarni, Apriana, Heryati, Suwonti Atun Badriah

Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: yuliarnieriel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana latar belakang terbentuknya prajurit perempuan (*Korps Prajurit Estri*) terhadap perkembangan ekonomi dan militer di Yogyakarta tahun 1750-1810 dan (2) bagaimana peranan prajurit perempuan (*Korps Prajurit Estri*) terhadap perkembangan ekonomi dan militer di Yogyakarta tahun 1750-1810. Metode penelitian yang digunakan adalah historis dan jenis penelitian kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan sehingga teknik analisis data terdiri dari kritik sumber dan interpretasi atau penafsiran dengan analisis kritis. Kesimpulan yang didapatkan yaitu: Terbentuknya *Korps Prajurit Estri* tahun 1750-1810 selain sebagai prajurit militer juga bertujuan untuk menjaga keamanan keraton dan menjadi pengawal pribadi Sultan Hamengkubuwana II. Peran prajurit perempuan terhadap perkembangan ekonomi yaitu ikut dalam kegiatan masyarakat seperti memberikan bantuan berupa bibit tanaman, dan pupuk. Hal ini berdampak semakin meningkatnya ekonomi rakyat. Sementara peran prajurit perempuan di bidang militer ialah mereka mempunyai kemampuan dalam menyusun strategi perang. Dengan adanya peran prajurit perempuan di bidang militer, Keraton Yogyakarta lebih terjaga keamanannya. Keraton Yogyakarta juga merasa lebih nyaman dengan adanya prajurit perempuan, timbul rasa kepercayaan Sultan terhadap prajurit perempuan, sehingga kaum perempuan menjadi sosok yang lebih tinggi dan tangguh di lingkungan keraton Yogyakarta.

Kata Kunci: ekonomi, korps *Prajurit Estri*, militer, Yogyakarta

Abstract

This study aims to find out (1) background of the formation of female soldiers (Estri Corps of Soldiers) and its effect to economic and political developments in Yogyakarta in 1750-1810 and (2) the role of women soldier (*Estri Corps*) and its effect to economic and political developments in Yogyakarta in 1750-1810. The research method used is historical and type of literature study. Data collection techniques are carried out with a literature study so that data analysis techniques consist of source criticism and interpretation or interpretation with critical analysis. The conclusions obtained are the formation of the *Estri Warriors Corps* in 1750-1810 aimed to maintain the security of the palace and become the personal bodyguard of Sultan Hamengkubuwana II. The role of female soldiers in economic development is to participate in community activities such as assisting in the form of plant seeds and fertilizer. This supporting has an impact on increasing people's economy. The role of female soldiers in politics is that they have the ability. It means devising a war strategy. With the purpose of female soldiers in the political field, the Sultan's Palace is more secure. The Sultan's Palace also felt more comfortable with the presence of female

warriors, the Sultan's sense of trust towards female soldiers arose, so that women became a higher and more resilient figure in the Yogyakarta palace environment.

Keywords: economics, *Estri Corps*, politics, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Berkuasanya Belanda dengan penerapan sistem monopoli perdagangan di seluruh pantai utara Jawa, mengakibatkan timbulnya banyak perlawanan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:52). Salah satu bentuk perlawanan Rakyat Yogyakarta terhadap Belanda adalah perang Mangkubumen (1746-1755). Perang ini menghasilkan perjanjian Giyanti dan menjadi cikal bakal terbentuknya Kesultanan Yogyakarta. Terbentuknya kesultanan Yogyakarta membutuhkan kekuatan militer. Tentunya penyusunan kekuatan militer peperangan dibutuhkan prajurit-prajurit yang tangguh, biasanya prajurit identik dengan laki-laki. Kowani (1986:55) menjelaskan bahwa “dunia keprajuritan selalu di identikkan dengan dunia lelaki, karena laki-laki dianggap pemberani dalam peperangan atau dalam hal apapun. Selain itu lelaki dinilai lebih mahir menggunakan senjata, menembakkan salvo, memantikkan api pada meriam, melindungi tubuh di bawah kawat berduri, dan bela diri, menunggang kuda dalam peperangan”. Pernyataan ini agak berbeda dengan kenyataan yang ada di keraton Yogyakarta, selain prajurit laki-laki juga ada prajurit perempuan.

Peran perempuan sebagai prajurit di Keraton Yogyakarta terasa sangat signifikan sejak Pemerintahan Hamengkubuwana II. Walaupun demikian, peranan perempuan ini sudah dimulai pada tahun 1613-1646 saat pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Prajurit Perempuan pertama kali dibentuk di Keraton Yogyakarta sendiri saat pemerintahan Hamengkubuwana I. Perempuan dapat menjadi seorang prajurit yang mampu

mengkoordinir jalannya sistem pemerintahan kesultanan Yogyakarta.

Dengan demikian, pembentukan pasukan khusus beranggotakan kaum perempuan ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru. Melainkan sudah ada pada masa berkuasanya Sultan Agung di Kerajaan Mataram, prajurit perempuan telah pernah ada. Seperti dijelaskan oleh Kumar (2008:31) “pada kenyataannya Sultan Agung memiliki prajurit-prajurit perempuan dalam korps keprajuritannya meskipun belum terbentuk dalam suatu pasukan khusus”. Dalam sistem pertahanan dan keamanan di kesultanan Yogyakarta sendiri terlihat meniru sistem pertahanan yang dimiliki kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung. Demikian pula dengan kebijakan untuk membentuk pasukan prajurit perempuan.

Adanya keterlibatan perempuan di Keraton Yogyakarta dipengaruhi oleh situasi politik yang ada di dalam keraton. “Pada masa Raden Mas Sundoro, atau lebih dikenal dengan gelar Sultan Hamengkubuwana II beliau dikenal sebagai sosok keras untuk tidak bersedia bekerja sama dengan pihak asing, yaitu Belanda. Segala cara dilakukan untuk menentang Belanda, yaitu salah satunya dengan menjaga keamanan di keraton” (Safitri, 2019:47). Prajurit perempuan dibentuk pada saat Sultan Hamengkubuwana II masih menjadi putra mahkota. Awalnya prajurit perempuan bertugas sebagai prajurit pengawal putra mahkota, namun ketika Sultan Hamengkubuwana II naik takhta, maka prajurit perempuan tidak hanya menjadi pengawal putra mahkota, melainkan sebagai penjaga keamanan keraton dan keselamatan sultan beserta keluarganya. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan sultan terhadap laki-laki, menurutnya laki-laki mempunyai

sifat pemberontak dibandingkan kaum perempuan yang mempunyai sifat penurut.

Meski demikian, prajurit perempuan yang dibentuk dalam lingkungan Keraton Yogyakarta adalah para prajurit yang telah terdidik dengan sistem militer. Carey (2014:90) mengatakan bahwa “empat puluh perempuan duduk berbaris di tahta sunan dan benar-benar bersenjata lengkap berikat pinggang dengan sebilah keris diselipkan di tali pinggang, masing-masing memegang sebilah pedang atau sepucuk bedil hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah prajurit perempuan yang mengagumkan”. Prajurit perempuan dalam hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata sebagaimana pandangan umum yang terjadi terhadap perempuan. Prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta telah dibekali dengan keahlian-keahlian seperti menunggang kuda, menembakkan *salvo* dan juga cara menggunakan senjata. Sehingga jika dilihat perbandingannya bahwa prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta terlihat lebih profesional dibandingkan dengan prajurit perempuan di Kerajaan Mataram saat Sultan Agung berkuasa.

Hal inilah yang menjadi dasar prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta semakin berkembang dalam masyarakat, yang pada tahap selanjutnya berperan pesat bagi bidang ekonomi dan militer. Dengan adanya prajurit perempuan dalam keraton, perubahan yang diinginkan menjadi kenyataan bahwa sebelum tahun 1810 sudah ada sekelompok perempuan gagah berani juga memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki. Perempuan mampu menunjukkan kemampuan mereka sebagai pasukan penjaga keamanan dan keselamatan sultan beserta keluarganya. “Prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta tidak dapat begitu saja dilupakan karena keberadaan menunjukkan adanya

kesempatan yang diberikan bagi kaum perempuan Jawa untuk berperan dalam bidang ekonomi dan politik” (Carey, 2014:72). Sekaligus juga membuktikan bahwa kaum perempuan Jawa memiliki kemampuan untuk ikut berjuang bersama-sama dengan kaum laki-laki membela kepentingan Rajanya dan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis lebih jauh mengenai peranan selanjutnya para prajurit perempuan (korps prajurit *estri*) yang merambah di bidang ekonomi dan militer serta dampak dari keikutsertaan para prajurit perempuan dalam mengatasi kondisi ekonomi dan militer di Keraton Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis atau metode sejarah. “Metode historis adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, misalnya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis” (Abdurahman, 2011:103). Sedangkan Menurut Hamid (2011: 42) metode historis adalah “suatu prosedur-prosedur dalam menyusun data yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan”. maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa metode historis merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengkaji masa lampau melalui proses sistematis dan berpikir kritis analisis. Abdurrahman (2011:104) menjelaskan tahapan dalam penelitian sejarah terdiri dari 4 tahap yaitu:

- (1) *heuristik* (pengumpulan sumber/data), pada tahapan ini dilakukan pencarian sumber yang berhubungan dengan kajian penelitian ini baik sumber primer maupun sekunder; (2)

verifikasi (kritik sumber) yaitu melakukan penyelidikan terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh; (3) *interpretasi* (analisis data) yaitu kegiatan menafsirkan sumber data yang telah diyakini keabsahannya; dan terakhir (4) *historiografi* (penulisan)”.

Berkaitan dengan jenis penelitian ini yaitu kajian pustaka sehingga kegiatan dalam proses pengumpulan data penulis lebih mendominasi pada studi kepustakaan atau mencari pada buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Prajurit Perempuan (*Korps Prajurit Estri*) di Yogyakarta Tahun 1750-1810

Prajurit perempuan seperti telah dijelaskan sebelumnya telah terbentuk pada abad ke-18 ketika berkuasanya Sultan Hamengkubuwana I. Akan tetapi fungsinya terlihat lebih signifikan ketika Sultan Hamengkubuwana II berkuasa yang dipengaruhi oleh situasi politik yang terdapat di dalam keraton pada saat itu, yaitu salah satunya untuk memperkuat keamanan yang dimiliki keraton. Selanjutnya prajurit perempuan tersebut diberi nama *Korps prajurit estri*. Alasannya karena prajurit *Estri* ini nantinya akan dihadiahkan kepada bangsawan lain untuk dijadikan istri yaitu istri bangsawan. Namun mereka akan merasa bangga dengan hal tersebut, sebab ada anggapan bahwa para bangsawan yang memperistri mereka nanti tidak akan berani memperlakukan mereka dengan buruk karena takut Raja akan murka. Prajurit yang dipilih oleh Sultan Hamengkubuwana II, harus mempunyai ciri-ciri wajah cantik, rapi, ramah tamah, dan mempunyai kecerdasan, untuk dijadikan penyambutan Raja-raja

maupun sebagai pengawal pribadi Sultan Hamengkubuwana II.

Pembentukan prajurit perempuan yaitu *Korps Prajurit Estri* di Kesultanan Yogyakarta tahun 1750, sudah lebih tertata dan juga dibekali dengan keahlian-keahlian seperti “menunggang kuda, menembakkan *salvo*, mengangkat senjata, dan bela diri. Sehingga terlihat lebih profesional, hal ini dimungkinkan dengan situasi keamanan saat itu yang membutuhkan tenaga prajurit yang memiliki kemampuan militer lebih baik dari masa sebelumnya” (Carey, 2014 : 40). Terkait salah satu tugas prajurit perempuan:

Prajurit perempuan bertugas sebagai prajurit pengawal putra mahkota, namun ketika Sultan Hamengkubuwana II naik tahta, maka prajurit perempuan tidak hanya menjadi pengawal putra mahkota, melainkan sebagai penjaga keamanan keraton dan keselamatan sultan beserta keluarganya. Hal ini sikap ketidakpercayaan Raja terhadap kaum laki-laki karena mempunyai sifat pemberontakan yang dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan (Carey, 2014 : 19).

Dengan dibentuknya prajurit perempuan di keraton Yogyakarta bukan hanya bertugas menjaga keamanan keraton, mengawal Sultan Hamengkubuwana II selain itu prajurit perempuan dipercayai untuk mengatur keuangan keraton karena Raja lebih mempercayai perempuan dibanding laki-laki, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwana II prajurit perempuan *Korps Prajurit Estri* ini juga ikut bertani maupun berkebun dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Yogyakarta. “Melihat keadaan masyarakat yang kurang semangat dan banyak mengeluh tentang hasil pertaniannya yang mengalami kerugian, maka prajurit

perempuan membantu masyarakat dengan membagikan tanaman yang akan ditanam di sawah dan membagikan pupuk kepada setiap warga” (Carey, 2014 : 40).

Munculnya prajurit perempuan, maka tidak hanya bertugas menjaga keamanan Sultan Hamengkubuwana II, menjaga keamanan di sekitar keraton dan beserta keluarga Sultan Hamengkubuwana II, tetapi juga ikut berperang pada saat terjadinya perang Mangkubumen. *Korps Prajurit Estri* tersebut berjumlah sebanyak 150 prajurit perempuan. Arti prajurit perempuan selanjutnya bagi kalangan keraton ialah “semakin mempermudah jalan untuk menghilangkan serangan dari luar, dengan cara menjaga keamanan keraton” (Kumar, 2008 : 11).

Jika demikian, maka pembentukan prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta menuntut banyak fungsi bagi kelangsungan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan keraton itu sendiri. Meskipun peran yang paling utama yaitu berpusat pada situasi militer, namun pada akhirnya menjalar pada lini kehidupan lainnya seperti kehidupan ekonomi keraton.

Peranan Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri) dalam Perkembangan Ekonomi dan Militer di Yogyakarta Tahun 1750-1810

1. Peranan Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri) dalam Perkembangan Ekonomi di Yogyakarta Tahun 1750-1810

Menurut Kuntowijoyo (2003 :91) kondisi ekonomi adalah “kegiatan dimana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan berbagai cara ataupun mata pencaharian demi menghidupi keluarga yang bertumpu pada sektor masing-masing”.

Selama masa penjajahan Belanda, perekonomian Indonesia

khususnya daerah Yogyakarta sangatlah bergantung pada sektor pertanian dan sebagian kecil pada sektor perdagangan kondisi dan situasi ini terjadi di seluruh pulau Jawa sejak menjelang abad ke-18, berbagai peraturan pemerintah Belanda di bidang perekonomian mempunyai dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa. “Pengaturan tentang penyewaan tanah untuk penanaman komoditi tertentu yang diharuskan pemerintah kolonial, kemudian pengaturan tentang pajak, tanam wajib sebagainya mengenal langsung pada pola ekonomi rakyat masyarakat Yogyakarta ”(Soemargono, 1992 :94).

Kondisi perekonomian yang terjadi pada abad ke-18 tidak terlepas dari keadaan sosial politik yang berlangsung juga. Sebagaimana diketahui dengan dibubarkannya *Vernidge Oostindische Compagnie* (VOC) pada tahun 1799 dan berkuasanya pemerintahan Hindia Belanda, maka sejak abad ke-19 terjadilah perubahan mendasar di dalam Masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tashadi mengenai perubahan di Jawa sebagai berikut :

“Perubahan terjadi secara mendasar pada masyarakat misalnya dalam sistem nilai, struktur masyarakat, relasi interpersonal dan ekonomi. Maka Hindia Belanda pada awal abad ke-19 tetap berpegang pada *politik eksploitasi*, yaitu berusaha mengeruk kekayaan daerah jajahan sedalam-dalamnya” (Tashadi, 1977 :31).

Sumber ekonomi utama yang bagi masyarakat Yogyakarta adalah tanah, hutan, kayu keras, pertanian, perkebunan, pajak. “Oleh karena, itu sistem ekonomi masyarakat

Yogyakarta bersifat agraris yang dalam masyarakat agraria Jawa, tanah dan tenaga merupakan modal pokok bagi produksi pertanian” (Kumar, 2008 : 37). Inilah kemudian yang menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat Yogyakarta menjadi sangat meresahkan rakyat, karena mereka merasa terbebani oleh berbagai pemungutan pajak. Selain itu ada masalah lain yaitu terkait sewa tanah ternyata sudah menjadi kebiasaan, yaitu yang dilakukan oleh para pemegang tanah dan Raja-raja” (Tashadi, 1997: 32). Situasi ekonomi tersebut juga tersangkut paut dengan kondisi politik yang sudah berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, sehingga mereka tidak sangat leluasa mengatur pemerintahannya sendiri untuk menyejahterakan rakyatnya.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa perubahan kondisi ekonomi yang terjadi pada masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta berlangsung pada abad ke-19 ditandai dengan adanya kegiatan eksploitasi dari Hindia Belanda yang terjadi baik terhadap baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Telah disinggung di atas bahwa fungsi prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta tidak hanya menyentuh jalur militer saja namun muncul pada bidang perekonomian. Dalam hal ini prajurit perempuan juga ikut andil dalam upaya memajukan bidang pertanian dan perkebunan rakyat. “Wujud bantuan tersebut dilihat dari kegiatan yang dilakukan yaitu dengan membagikan tanaman yang akan ditanam di sawah dan membagikan pupuk kepada setiap warga” (Carey, 2014: 40). Wujud bantuan tersebut menjadi salah satu indikator penentu yang berdampak langsung pada kesejahteraan

masyarakat Jawa yaitu daerah Yogyakarta.

Prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta tidak hanya memberikan bantuan berupa pupuk, lebih lanjut mereka juga ikut bertani bersama masyarakat. Selain bidang pertanian, mereka para prajurit perempuan juga berdagang, sehingga terjadi perkembangan yaitu bahwa bukan hanya laki-laki yang dapat bertani dan berdagang, perempuan juga dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan ikut andilnya prajurit perempuan tersebut, maka bidang pertanian dan sistem perdagangan juga mengalami perkembangan. Dalam perkebunan prajurit perempuan juga ikut serta menanam sayuran dan menanam umbi-umbian untuk kelangsungan hidup. Kumar (2008:42) menjelaskan:

Masyarakat Yogyakarta bergantung pada usaha pertanian dan perkebunan yang memiliki arti penting sebagai kelangsungan hidup dalam masyarakat. Kehidupan ekonomi Yogyakarta lebih berkembang setelah adanya prajurit perempuan di keraton Yogyakarta prajurit perempuan yang ikut memajukan dalam bidang ekonomi masyarakat Yogyakarta.

Berdasarkan sumber-sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan prajurit perempuan dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi memiliki arti yang penting. Peran prajurit perempuan dapat menyatu pada pola kehidupan mata pencaharian masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta yang sebagian besar bergantung pada usaha pertanian dan perkebunan dapat mengalami perkembangan

terutama dengan adanya pemberian pupuk bagi tanaman masyarakat. Para prajurit perempuan juga mengajarkan arti bahwa perempuan dapat bermanfaat besar bagi bidang kehidupan jika mereka dapat dihargai dengan cara memberikan ruangan seluas-luasnya untuk mereka mengembangkan diri misalnya dalam bertani dan berdagang. Di samping itu tumbuh pula semangat dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri yaitu dengan melakukan penanaman sendiri seperti umbi-umbian untuk kelangsungan hidup.

2. Peranan Prajurit Perempuan (*Korps Prajurit Estri*) dalam Bidang Militer di Yogyakarta Tahun 1750-1810

Daerah Yogyakarta termasuk daerah yang memiliki tradisi sejarah politik yang panjang. Tradisi itu bahkan sudah di mulai jauh sebelum adanya kesadaran nasionalisme di seluruh pelosok Nusantara. Secara khusus konflik politik di Yogyakarta dapat di katakan dimulai menyusul wafatnya Sultan Agung, “yaitu ketika pertikaian melanda Kerajaan Mataram, sehingga oleh Belanda kemudian Yogyakarta Hadiningrat melalui perjanjian Giyanti 13 Februari 1755” (Soemargono, 1992 : 134). Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan susunan pemerintah warisan dari Mataram. Pemerintah dibedakan menjadi dua urusan besar yaitu urusan dalam dan urusan luar yang disebut *peranteh Negari* (Pemerintah Negri) Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintah negaranya.

Sikap Belanda yang banyak ingin untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan di Jawa menimbulkan benih-benih

ketidaksenangan Sultan terhadap Belanda. “Raja-raja Jawa baik Surakarta maupun Yogyakarta mengakui subordinasinya terhadap kekuasaan Belanda. Campur tangan pemerintah dalam pengangkatan Raja-raja serta penguasa dan pengelolaan tanah-tanah rakyat menimbulkan sentimen anti Belanda” (Rahimsyah, 2003 : 142). kondisi yang demikian dilakukan oleh Belanda ditambah dengan masalah internal keraton menyebabkan perang Mangkubumen.

Prajurit perempuan yang dibahas pada kajian ini, menjadi pasukan terdepan yang nantinya muncul menghadapi ketidakstabilan di lingkungan keraton. Pecahnya perang Mangkubumen akibat ketidaksenangan terhadap Belanda juga membawa peran para prajurit perempuan untuk bertempur menghadapinya. Dalam perang “prajurit perempuan *Korps Prajurit Estri* memiliki teknik tertentu, yang diistilahkan sebagai daun lumbu atau daun keladi, dimana pasukannya *berkerudung Daun Lumbu*, sehingga dari kejauhan tampak seperti tanaman keladi, namun bila musuh mendekat, maka pasukannya, akan menyerang secara habis-habisan” (Winda, 2009 : 51).

Pasukan prajurit perempuan disini sama-sama berjuang bersama para pemuda pejuang. Lewat tengah malam, pimpinan perjuangan serang yang diketahui oleh prajurit perempuan *Korps Prajurit Estri* berangkat dengan diam-diam menuju Desa Gundih, yang pada waktu itu masih dalam keadaan aman. Di sini rombongan sempat melakukan Sholat Subuh. Setelah itu, kegiatan pun dimulai untuk menyusun barisan yang lebih sempurna yang pernah diajari oleh Sultan Hamengkubuwana II. Barisan

diperkuat dengan pemuda-pemuda pejuang yang berdatangan dari daerah-daerah sekitar Sragen. sehari kemudian barisan serang melalui perjalanannya menuju ke utara. Serangan pertama mereka dimulai di Gambringan yang dilakukan terhadap pasukan pengawal Belanda. Itulah hari-hari pertama *prajurit perempuan* beserta pemuda-pemuda pejuang terjun ke dalam perang besar, yang disebut perang Mangkubumen.

Strategi yang kerap diterapkan oleh prajurit perempuan Keraton Yogyakarta (*Korps Prajurit Estri*) membuat Hamengkubuwana I mengakui keandalan prajurit perempuan. “Hamengkubuwana I kemudian mengangkat prajurit perempuan menjadi seorang penasihatnya. kedudukan prajurit perempuan sebagai penasihat sejajar dengan Hamengkubuwana I dengan pangeran Joyokusumo dalam siasat perang” (Kumar, 2008 : 102). Prajurit perempuan bersama Hamengkubuwana I selain meningkatkan taktik daun keladi juga membentuk pasukan khusus berani mati yang dinamakan pasukan *sesabet*. Namun prajurit perempuan dengan jumlahnya yang terbatas serta, awal keberadaannya yang sebagai prajurit penjaga keamanan keraton milik Sultan Hamengkubuwana II justru berimbas dalam mempermudah jalan untuk menghilangkan prajurit Perempuan di Kesultanan Yogyakarta. Dalam proses terjadinya perang Mangkubumen tidak hanya di satu tempat saja melainkan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya di dalam wilayah Yogyakarta diantaranya di wilayah Selarong dan Dekso.

a. Wilayah Selarong, Markas Besar Pertama

“Desa Selarong adalah salah satu daerah strategis yang berada di kaki bukit kapur yang berjarak lebih kurang Sembilan kilometer dari Yogyakarta yang telah dan secara diam-diam dipersiapkan sebagai markas komando” (Poesponegoro, 2008 : 231). Dari Selarong, tentara mengepung kota Yogyakarta, sehingga Sultan Hamengkubuwana II diselamatkan ke benteng Belanda. Perang pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan siasat perang mendadak menyerbu musuh.

b. Wilayah Dekso, Markas Besar Kedua

Setelah mengalami penyerangan Belanda yang kedua kalinya, bahwa pemusatan tentara di Selarong tidak menguntungkan lagi. Jarak antara Yogyakarta dengan Selarong terlalu dekat lebih kurang 10 Km, tentara Belanda harus dipancing supaya melakukan perjalanan yang lebih jauh agar siasat perang lebih mudah dijalankan. Lebih jauh jarak yang ditempuh oleh tentara lawan, lebih banyak kesempatan untuk menyerang ditempat-tempat yang strategis. “Markas besar untuk perang di pindahkan ke Dekso yang jaraknya 25 Km dari Yogyakarta. Di Desa pun dapat digunakan menjadi tempat persembunyian dan akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan rakyat Kedu dan Banyumas” (Raksakusumah, 1985 : 48).

Setelah kasus peperangan di dua tempat tersebut justru tidak banyak prajurit perempuan disebutkan. Ada anggapan menghilangnya keberadaan prajurit perempuan *Korps Prajurit Estri* disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terjadinya perubahan kepemimpinan di Kesultanan Yogyakarta, hilangnya fungsi militer di keraton Yogyakarta

serta terbatasnya dana yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta untuk membiayai personel militernya maka dihapuskannya prajurit perempuan *Korps Prajurit Estri* di keraton Yogyakarta. “Dihapuskannya prajurit wanita ini juga dikarenakan kedudukan prajurit yang belum menjadi prajurit resmi selamanya keraton, dan masih sebatas pengawal pribadi Sultan Hamengkubuwana II dan menjaga keamanan di sekeliling keraton Yogyakarta selain itu, juga adanya tekanan dari pihak asing yang menghendaki agar kekuatan militer kerajaan-kerajaan Jawa menjadi lemah”(Carey, 2014 : 63)

Besarnya peran prajurit perempuan yang terlihat pada masa awal pembentukan dan seterusnya dapat berakhir seiring berakhir pula kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II. Meski demikian, para prajurit perempuan telah ikut memberikan sumbangsih besar untuk mengembangkan taktik berperang. Selain itu pernah diangkatnya seorang prajurit perempuan sebagai penasihat sultan telah menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak dapat dipandang sebelah mata dalam urusan politik keraton. Di lain sisi juga dengan kondisi masyarakat Yogyakarta yang umumnya menganggap rendah kaum perempuan, Sultan justru menempatkan kaum perempuan sebagai sosok yang lebih tinggi dan tangguh di lingkungan keraton Yogyakarta. Meski disayangkan dengan berakhirnya kekuasaan Sultan Hamengkubuwana II maka di hapuskan juga prajurit perempuan di keraton Yogyakarta dan dialihkan menjadi pelayan biasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas mengenai *Peranan Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri) Terhadap Perkembangan Ekonomi dan*

Militer di Yogyakarta Pada Tahun 1750-1810, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Prajurit Perempuan (*Korps Prajurit Perempuan*) dibentuknya prajurit perempuan pada tahun 1750-1810 yang bertujuan untuk menjaga keamanan keraton dan sebagai pengawal pribadi Sultan Hamengkubuwana II serta sebagai prajurit perempuan di dalam keraton Yogyakarta yang dipercayai oleh Sultan Hamengkubuwana II untuk menjaga keamanan keraton.
2. Peranan prajurit perempuan bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta terbagi menjadi dua bagian yaitu peranan dalam bidang ekonomi dan peranan dalam bidang militer.
 - a. Peranan Prajurit Perempuan dalam Bidang Ekonomi:
Prajurit perempuan juga ikut bertani, masyarakat Yogyakarta mengalami peningkatan dalam bidang ekonominya yang memenuhi dan mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Prajurit perempuan juga memberikan bantuan berupa bibit tanaman dan pupuk. Selain bertani di dalam lingkungan keraton maupun dalam masyarakat *Prajurit Estri* ini juga ikut berdagang. Hal ini berdampak juga pada pola mata pencaharian masyarakat yang berusaha memenuhi kelangsungan hidup dengan menanam sayur dan umbi-umbian, artinya mereka terdidik mandiri mengandalkan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. Peranan Prajurit Perempuan dalam Bidang militer yaitu :
Prajurit perempuan mempunyai kemampuan, dalam menyusun strategi perang dan diangkat oleh Hamengkubuwana I sebagai

penasihat perang dan membuat semangat para pengikutnya, serta prajurit perempuan turut berkobar dalam melawan penjajahan belanda. Bahkan prajurit perempuan juga ikut melibatkan diri dalam perang Mangkubumen dan diangkat sebagai penasihat dalam perang. Di lain sisi juga dengan kondisi masyarakat Yogyakarta yang umumnya menganggap rendah kaum perempuan, Sultan justru menempatkan kaum perempuan sebagai sosok yang lebih tinggi dan tangguh di lingkungan keraton Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Carey, Peter. Vincent, Houben. 2014. *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVII-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hamid, Abd. Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kowani, 1986. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kumar, Ann. 2008. *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahimsyah. 2003. *Kisah Para Pahlawan Bangsa*. Surabaya: Greisinda Press
- Raksakusumah, Said. 1985. *Perang Mangkubumen*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Safitri, Ilmiawati. 2019. Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Sukses Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana “Raja Perempuan”. *Indonesian Historical Studies*, Vol.3 No. 1.
- Soemargono, Dkk. 1992. *Profil Provinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Yayasan Bhakti wawasan Nusantara.
- Tashadi, Dkk. 1977/1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek penelitian Kebudayaan Daerah.
- Winda, D.A. 2009. *Profil 143 Pahlawan Nasional*. Jakarta: Pustaka Timur.